



ANJUNGAN MINYAK ENPING 15-1 - SHENZHEN

Foto udara ini menunjukkan anjungan minyak Enping 15-1 200 km barat daya Shenzhen, Tiongkok, Rabu (31/5). Proyek penyimpanan karbon lepas pantai sejuta ton pertama Tiongkok dioperasikan pada hari Kamis dan menyimpan total lebih dari 1,5 juta ton karbon dioksida (CO₂), yang setara dengan menanam hampir 14 juta pohon.

Kasus COVID Diprediksi Capai 65 Juta Per Minggu, Tiongkok Ketar-Ketir Bikin Vaksin

Spesialis penyakit pemapasan Zhong Nanshan pada konferensi bioteknologi di Guangzhou, mengatakan peningkatan ini terjadi hampir enam bulan setelah Tiongkok menanggalkan kebijakan Zero COVID, yang memungkinkan virus menyebar dengan cepat di antara 1,4 miliar penduduk negara itu.

BEIJING (IM)- Gelombang kasus COVID-19 kembali melanda Tiongkok. Diperkirakan puncak gelombang ini akan terjadi pada Juni 2023, dengan kasus per pekan diprediksi mencapai 65

juta kasus.

Spesialis penyakit pernapasan Zhong Nanshan pada konferensi bioteknologi di Guangzhou, mengatakan peningkatan ini terjadi hampir enam bulan setelah Tiongkok

menanggalkan kebijakan Zero COVID, yang memungkinkan virus menyebar dengan cepat di antara 1,4 miliar penduduk negara itu.

Sejak beralih ke kebijakan 'hidup dengan virus' di awal Desember, Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Tiongkok berhenti memperbarui infeksi mingguan. Bahkan pelanggaran protokol yang mendadak itu menyebabkan 37 juta infeksi baru dalam sehari beberapa minggu kemudian.

Pada bulan Januari, para ahli meyakini bahwa hampir 80 persen dari 1,4 miliar penduduk Tiongkok sudah terinfeksi dalam gelombang pertama.

Pada gelombang kedua semenjak April, data yang dibuat Zhong menunjukkan bahwa varian XBB diperkirakan menjadi penyebab 40 juta infeksi setiap minggu pada Mei, naik menjadi 65 juta pada Juni.

Data tersebut bertentangan dengan perkiraan pejabat kesehatan Tiongkok bahwa gelombang telah memuncak pada bulan April. Di Beijing sendiri, jumlah infeksi baru yang tercatat antara 15 sampai 21 Mei meningkat empat kali lipat dalam empat minggu.

Dikutip dari Time, Zhong mengatakan vaksin yang menargetkan varian khusus XBB ini akan segera diluncurkan. Regulator obat negara itu juga

telah memberikan persetujuan awal untuk dua vaksin semacam itu, dengan tiga atau empat lainnya diperkirakan akan segera disetujui.

"Kami dapat memimpin secara internasional dalam mengembangkan vaksin yang lebih efektif," kata Zhong.

Di sisi lain, ahli epidemiologi Deakin University Australia Catherine Bennet mengatakan gelombang baru yang muncul menguji keefektifan vaksin dan booster yang dimiliki Tiongkok.

Bennet menambahkan bahwa vaksin yang diberikan harus selalu diperbarui, terutama untuk orang tua dan populasi rentan. ● tom

Afrika Selatan Pertimbangkan Opsi Penangkapan Vladimir Putin

CAPE TOWN (IM)- Afrika Selatan sedang mempertimbangkan pilihannya atas surat perintah penangkapan Mahkamah Kriminal Internasional (ICC) untuk Presiden Rusia Vladimir Putin, jika ia menerima undangan ke pertemuan puncak BRICS pada Agustus, kata seorang pejabat pemerintah negara itu. "Belum ada keputusan tegas," kata Zane Dangor, direktur jenderal departemen hubungan internasional, seperti dikutip Reuters, Kamis (1/6).

Ia menambahkan bahwa menteri yang ditugaskan untuk masalah ini akan segera bertemu untuk mempertimbangkan laporan yang menetapkan opsi tersebut. Salah satu opsi yang menarik perhatian para pejabat Afrika Selatan adalah meminta ketua BRICS sebelumnya, Tiongkok, untuk menjadi tuan rumah KTT itu, kata seorang pejabat senior pemerintah, yang berbicara tanpa menyebut nama.

Wakil Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Ryabkov mengatakan pada Kamis bahwa laporan KTT BRICS akan dipindahkan ke Tiongkok dari Afrika Selatan adalah palsu, Interfax melaporkan.

Kremlin mengatakan pada Selasa bahwa Rusia akan mengambil bagian pada "tingkat yang tepat". Afrika Selatan secara teoritis akan diminta untuk menangkap Putin di bawah surat perintah yang dikeluarkan pada Maret oleh pengadilan sebab negara itu merupakan anggota ICC.

Menurut ICC, Putin melakukan kejahatan perang dengan deportasi paksa anak-anak dari wilayah yang diduduki Rusia di Ukraina. Moskow membantah tuduhan itu. Seorang pejabat senior Rusia juga menolak gagasan untuk memindahkan KTT ke Tiongkok.

Afrika Selatan pada 25 Januari telah mengundang Putin ke pertemuan 22-24 Agustus di Johannesburg dari para pemimpin BRICS dari negara berkembang, yang terdiri dari Brasil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan.

Mantan Presiden Thabo Mbeki, yang pandangnya tentang hubungan

internasional memegang banyak pengaruh di kalangan pejabat pemerintah — mengatakan, pertemuan puncak itu tidak mungkin terjadi di Afrika Selatan.

"Karena kewajiban hukum kami, kami harus menangkap Presiden Putin, tapi kami tidak bisa melakukannya," kata Mbeki dalam wawancara 25 Mei dengan stasiun radio 702.

Seorang wakil menteri, Obedi Bapela, mengatakan kepada BBC pada Selasa bahwa Afrika Selatan berencana untuk meloloskan undang-undang yang akan memberi Pretoria pilihan untuk memutuskan apakah akan menangkap pemimpin yang diinginkan oleh ICC atau tidak.

Bapela tidak menanggapi permintaan komentar. Namun, seorang pejabat departemen kehakiman, yang berbicara tanpa menyebut nama, mengatakan tidak akan ada cukup waktu untuk mendapatkan undang-undang semacam itu disetujui oleh parlemen sebelum pertemuan puncak.

Afrika Selatan pada Senin mengeluarkan kebalan diplomatik kepada semua pemimpin yang menghadiri pertemuan dan pertemuan para menteri luar negeri BRICS di Cape Town pekan ini.

Namun, departemen hubungan internasional mengatakan ini adalah prosedur standar untuk semua konferensi internasional di Afrika Selatan. "Kekebalan ini tidak mengesampingkan surat perintah apa pun yang mungkin telah dikeluarkan oleh pengadilan internasional mana pun terhadap peserta konferensi," kata juru bicara departemen Clayton Monyela.

Afrika Selatan sebelumnya mengisyratkan niatnya untuk mundur dari ICC menyusul protes tentang kegagalannya menangkap mantan presiden Sudan Omar al-Bashir.

Saat itu Bashir menghadiri pertemuan puncak Uni Afrika di Johannesburg pada 2015. Ia jadi buron atas tuduhan genosida. Kongres Nasional Afrika yang berkuasa memutuskan pada Desember bahwa Afrika Selatan harus mengabaikan proses tersebut dan mencoba melakukan perubahan terhadap ICC dari dalam. ● tom

AS Beri Ukraina Senjata Baru Rp4,49 Triliun, tapi Tidak untuk Serang Wilayah Rusia

WASHINGTON (IM)- Amerika Serikat pada Rabu (31/5) mengumumkan paket senjata baru senilai 300 juta dolar AS (Rp 4,49 triliun) kepada Ukraina, tetapi memperingatkan jangan digunakan untuk menyerang wilayah Rusia.

"Kami sudah sangat jelas dengan Ukraina secara pribadi—juga secara publik—bahwa kami tidak mendukung serangan di dalam Rusia. Kami tidak mengizinkan dan kami tidak mendorong serangan di dalam Rusia," kata juru bicara Dewan Keamanan Nasional John Kirby kepada wartawan, dikutip dari kantor berita AFP.

Departemen Pertahanan AS mengungkapkan, pengiriman terbaru ini akan membuat total bantuan "Negeri Paman Sam" ke Ukraina menjadi 37,6 miliar dolar AS (Rp 562,52 triliun) sejak invasi Rusia pada Februari 2022.

"Amerika Serikat akan terus bekerja dengan para sekutu dan mitranya untuk memberi Ukraina kemampuan memenuhi kebutuhan medan perang langsung dan persyaratan bantuan keamanan jangka panjang," ujar Pentagon.

Pengiriman senjata terbaru ini dilakukan saat Ukraina mempersiapkan serangan balasan untuk memukul mundur pasukan Rusia dari petak-petak wilayah pendudukan di timur dan selatan Ukraina.

Bantuan tersebut juga dikeluarkan setelah serentetan serangan dalam gelap terhadap sasaran di dalam Rusia, termasuk gelombang serangan drone yang belum pernah terjadi sebelumnya di Moskwa.

Kirby mengatakan, Amerika Serikat sudah menetapkan aturan dasarnya ke Ukraina.

"Kami tidak memberitahu mereka di mana harus menyerang. Kami tidak memberitahu mereka di mana tidak boleh menyerang," katanya. "Pada akhirnya, Presiden (Volodymyr) Zelensky dan komandan militernya memutuskan apa yang akan mereka lakukan."

Namun, "kami tentu tidak ingin melihat serangan di dalam Rusia yang disebarkan, yang dilakukan, menggunakan peralatan pasokan AS."

Kirby melanjutkan bahwa meskipun ketegangan meningkat atas masalah ini, Gedung

Putih tetap yakin Ukraina akan menepati janjinya untuk tidak menggunakan jet tempur F-16 buatan AS—yang akan dipasok oleh negara-negara Eropa—terhadap target di luar perbatasan Ukraina.

"Kami mendapatkan jaminan itu di berbagai tingkatan," kata Kirby. Kirby menambahkan, meski Washington dengan sepenuh hati mendukung Ukraina mengalahkan invasi Rusia, ia ingin menghindari situasi yang menyedot Barat, NATO, dan Amerika Serikat serta menghindari Perang Dunia III. Pentagon mengatakan, paket 300 juta dolar AS itu termasuk amunisi untuk sistem pertahanan udara Patriot, rudal pertahanan udara AIM-7, sistem pertahanan udara Avenger, dan rudal anti-pesawat Stinger.

Juga bagian dari paket adalah amunisi untuk Sistem Roket Artileri Mobilitas Tinggi (HIMARS), peluru artileri 155mm dan 105mm, amunisi tank 105mm, serta roket pesawat Zuni. Amerika Serikat turut mengirim lebih dari 30 juta butir amunisi senjata kecil ke Ukraina, kata Pentagon. ● tom



PANEN CERI DI PROVINSI SHANDONG

Anggota staf pasar ceri setempat menyortir buah ceri di Kotapraja Yanya, Kabupaten Yiyuan, Provinsi Shandong, Tiongkok, Rabu (31/5). Panen ceri sedang berlangsung di Kotapraja Yanya. Pasar ceri lokal yang membentang sepanjang 3 kilometer telah menarik pembeli dari seluruh negeri.

Uji Coba Rudal Korut Bahayakan Pelayaran Komersial

PYONGYANG (IM)- Uji coba rudal yang dilakukan Korea Utara (Korut) dianggap membahayakan keselamatan pelayaran komersial di jalur laut yang sibuk di wilayah timur laut Asia. Hal itu disampaikan sejumlah negara kepada badan PBB, Organisasi Maritim Internasional.

Dilansir media Reuters dan Channel News Asia, Kamis (1/6), peluncuran satelit keenam Korea Utara pada hari Rabu (31/5) berakhir dengan kegagalan, dengan alat pendorong dan muatannya jatuh ke laut. Insiden itu memicu peringatan darurat dan peringatan evakuasi di beberapa bagian Korea Selatan dan Jepang.

Sebuah resolusi yang diadopsi oleh mayoritas lebih dari 100 negara yang menghadiri pertemuan komite keamanan Organisasi Maritim Internasional (IMO), "mengancam keras" uji coba rudal "yang secara serius mengancam keselamatan pelaut dan pelayaran internasional".

Korea Utara menolak resolusi tersebut dan sebuah berkas yang diajukan oleh negara-negara termasuk Amerika Serikat, Korea Selatan dan Jepang, Korut menyebut bahwa uji coba rudal "merupakan tindakan pertahanan diri rutin dan terencana yang diambil oleh negara berdaulat untuk mempertahankan keamanan nasional".

"(Korea Utara) tidak dalam posisi untuk dapat memberikan pemberitahuan sebelumnya tentang latihan militernya dan langkah-langkah pertahanan diri," kata otoritas Korut dalam pernyataan kepada komite IMO.

Pemerintah Korea Utara menambahkan bahwa peluncuran rudal itu "berdasarkan perhitungan ilmiah yang akurat dan pertimbangan titik dampaknya dan rute kapal-kapal yang berlayar di perairan tersebut".

Sebelumnya, satelit mata-mata milik Korea Utara (Korut) dilaporkan gagal mengudara dan jatuh di laut. Kejadian ini memicu sirene di negara tetangga seperti Jepang dan Korea Selatan berbunyi.

Dilansir AFP, Rabu (31/5), Korut telah mengabarkan kepada negara tetangganya, Selasa (30/5), bahwa akan meluncurkan 'satelit mata-mata militer no 1' sebelum 11 Juni. Pyongyang menyebut satelit mata-mata buaatannya akan 'sangat diperlukan untuk melacak, memantau... dan mengatasi secara langsung tindakan militer berbahaya AS dan pasukan pengikutnya'.

Otoritas luar angkasa Korut mengumumkan peluncuran satelit mata-mata militer bernama 'Malligyong-1' melalui kantor berita resmi Korut, Korean Central News Agency (KCNA). Satelit itu disebut jatuh ke lautan segera setelah diluncurkan ke orbit luar angkasa.

"Meluncurkan satelit mata-mata militer, 'Malligyong-1', yang dipasang pada roket pembawa tipe baru, 'Chollima-1', di Lapangan Peluncuran Satelit Sohae di Distrik Cholsan, Provinsi Phyngwon Utara pada pukul 06.27 waktu setempat, pada 31 Mei," sebut KCNA dalam laporannya.

Laporan KCNA mengatakan bahwa roket yang membawa satelit mata-mata itu gagal mencapai orbit dan terjatuh 'setelah kehilangan daya dorong akibat awal abnormal dari mesin tahap kedua setelah pemisahan tahap pertama selama peluncuran normal'. ● tom

Rusia Klaim Rudalnya Hancurkan Kapal Perang Terakhir Ukraina

MOSKOW (IM)- Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim bahwa pasukannya telah menghancurkan apa yang disebutnya sebagai "kapal perang terakhir" Ukraina dalam serangan rudal di pelabuhan Odesa, beberapa hari lalu. Sejuah ini tidak ada komentar langsung dari pemerintah Ukraina tentang nasib kapal tersebut.

"Kapal perang terakhir angkatan laut Ukraina, Yuriy Olefirenko, dihancurkan dalam serangan ke kapal perang yang berlabuh di pelabuhan Odesa," kata juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Igor Konashenkov dalam briefing harian tentang invasi Rusia di Ukraina, seperti diberitakan Reuters dan Channel News Asia, Kamis (1/6).

Dia mengatakan kapal itu telah dihantam dengan "senjata presisi tinggi" - frasa yang dia gunakan untuk menyebut rudal - pada 29 Mei, tetapi tidak memberikan rincian lebih lanjut.

Sebelumnya, pejabat-pejabat Ukraina mengatakan pada hari Senin lalu bahwa Rusia telah melumpuhkan lima pesawat dalam serangan terhadap sasaran militer di Ukraina barat dan menyebabkan kebakaran di pelabuhan Laut Hitam, Odesa dalam serangan udara pada Senin dini hari waktu setempat.

Kementerian Pertahanan Rusia juga mengatakan pada hari Rabu (31/5) bahwa pasukannya telah mengusir unit-unit militer Ukraina keluar dari posisi di sekitar permukiman Krasnohorivka dan Yasynuvata di wilayah Donetsk, Ukraina timur, yang diklaim Moskow telah dianeksasi.

Kementerian itu mengatakan "pertempuran sengit" berlanjut di sekitar Avdiivka, sebuah kota besar yang terletak di antara dua permukiman tersebut, yang sebagian besar telah rata dengan tanah selama pertempuran berbulan-bulan. ● tom

Xi Jinping Minta Pejabat Keamanan Tiongkok Bersiap untuk Skenario Terburuk

BEIJING (IM)- Pemimpin China Xi Jinping telah meminta para pejabat tinggi keamanan nasionalnya untuk memikirkan skenario "kasus terburuk" dan bersiap menghadapi "lautan badai".

Dilansir media CNN, Kamis (1/6), hal ini disampaikan Xi Jinping seing Partai Komunis yang berkuasa, Xi mengatakan Tiongkok tengah meningkatkan upaya untuk melawan setiap ancaman internal dan eksternal yang dirasakan.

"Kompleksitas dan kesulitan masalah keamanan nasional yang kita hadapi sekarang telah meningkat secara signifikan," kata Xi pada pertemuan Komisi Keamanan Nasional Partai Komunis pada Selasa lalu, seperti dilaporkan kantor berita Xinhua.

"Kita harus mematuhi pemikiran mendasar dan pemikiran skenario terburuk, dan bersiap untuk menjalani ujian besar dari angin kencang dan gelombang besar, dan bahkan lautan badai yang berbahaya," ujar Xi.

Instruksi tegas terbaru dari Xi ini disampaikan saat Beijing menghadapi sejumlah tantangan, dari ekonomi hingga apa yang dilihatnya sebagai lingkungan internasional yang semakin bermusuhan.

Menghadapi apa yang disebutnya sebagai situasi "kompleks dan serius", Xi mengatakan Tiongkok harus mempercepat modernisasi sistem dan kemampuan keamanannya nasionalnya, dengan fokus untuk membuatnya lebih efektif dalam "pertempuran aktual dan penggunaan praktis".

Menurut para ahli, sejak berkuasa satu dekade lalu, Xi telah menjadikan keamanan nasional sebagai paradigma utama yang membebaskan semua aspek pemerintahan Tiongkok. Dia telah memperluas konsep keamanan nasional untuk mencakup segala hal mulai dari politik, ekonomi, pertahanan, budaya, dan ekologi hingga dunia maya. ● tom